

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU KEDUA JUNI 2012

Minggu-minggu awal Juni 2012 atau kegiatan DPR awal Masa Persidangan IV tahun sidang 2011-2012 mengangkat Agenda Rapat Paripurna antara lain Rapat Paripurna tanggal 5 Juni dan kegiatan-kegiatan lainnya di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Berikut ringkasannya.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie

PARIPURNA TANGGAL 5 JUNI (PENETAPAN CALON PEJABAT PUBLIK)

Agenda Rapat Paripurna tanggal 5 Mei adalah penetapan calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rapat Paripurna mendengarkan laporan Ketua Komisi II DPR-RI, berkaitan dengan proses penentuan bakal calon anggota DKPP. Dalam laporannya, Ketua Komisi II menyampaikan bahwa, berdasarkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pasal (4) mengatakan: “DKPP dibentuk paling lama 2 bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji”. Pasal (4) mengatur bahwa: “DKPP terdiri dari, 1 orang unsur KPU, 1 orang unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat”. Dalam hal 5 anggota DKPP berasal dari tokoh masyarakat, ayat (6) mengatakan: “dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat dimaksud, Presiden mengusulkan 2 orang, dan DPR mengusulkan 3 orang”.

Setelah melalui rapat-rapat intern Komisi, maka atas dasar persetujuan fraksi-fraksi pada tanggal 31 Mei 2012, Rapat Intern Komisi II telah mengadakan rapat membicarakan 3 nama bakal calon DKPP yang diusulkan oleh fraksi-fraksi. Dengan musyawarah mufakat, Komisi II menyepakati 3 nama calon DKPP yang diusulkan DPR yaitu: Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH. MH., Saut Hamonongan Sirait, dan Nur Hidayat Sardini. Pada tanggal 4 Juni telah dilakukan Raker dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu, dengan agenda pemberitahuan tentang calon anggota DKPP usulan DPR. Pada Rapat Paripurna tanggal 5 Juni, 3 nama calon usulan Komisi II DPR tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna.

Selain penetapan calon anggota DKPP tersebut, Dewan juga mempunyai tanggungan untuk menangani beber-



apa calon pejabat publik lainnya, yaitu: Anggota Dewan Komisiner OJK, Calon Hakim Agung, dan Calon Anggota KPHI.

Pencalonan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, diserahkan pemrosesannya kepada Komisi XI DPR RI yang akan melakukan fit and proper test, dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Musyawarah, untuk selanjutnya di agendakan pada rapat Paripurna untuk di ambil keputusan.

Penetapan Calon Hakim Agung. Untuk mengisi 5 Hakim Agung yang pensiun pada semester pertama tahun 2012, terdiri dari 2 (dua) Hakim Agung Perdata, 2 (dua) Hakim Agung Pidana, dan 1 (satu) Hakim Agung Militer. Keputusannya dis-

erahkan kepada Komisi III untuk pemrosesannya, hasilnya dilaporkan ke Badan Musyawarah dan selanjutnya diagendakan pada Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Calon anggota KPHI (Komisi Pengawas Haji Indonesia) Pengganti Alm. Dr. H.A. Chalik Masulili, M.Sc. diputuskan penanganannya kepada Komisi VIII.

Kedua agenda tersebut sedang dalam proses.

PELAKSANAAN BIDANG LEGISLASI

Pada minggu-minggu ini, DPR melalui berbagai Komisi dan Pansus melanjutkan pembahasan beberapa RUU Prioritas, diantaranya: [**pertama**] RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L). Komisi IV yang bertugas menangani RUU ini belum melangkah jauh perihal target penyelesaian atas RUU yang telah bebrapa kali diperpanjang masa tugasnya. Pada minggu terakhir bulan Mei 2012, Pimpinan Dewan telah memimpin pertemuan konsultasi antara Pimpinan Komisi IV DPR, Ketua Poksi-Poksi Komisi IV dengan Menteri Kehutanan. Pada pertemuan tersebut, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa RUU ini telah mengalami 4 kali

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra Sasmita; Rizka Arinindy **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



perpanjangan waktu pembahasan, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda penyelesaian pembahasan, disebabkan adanya perbedaan pendapat mengenai **struktur organisasi badan**, sehingga pembahasan RUU ini masih terhenti untuk sementara.

Dalam Rapat Konsultasi tersebut, Pemerintah mengatakan bahwa Badan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan disepakati berbentuk Badan, dengan struktur di bawah Presiden dan bersifat independen atau ad-hoc. Namun, pengertian independen antara DPR dan Pemerintah yang belum sepaham, apakah independen ini diisi dari umum kemudian diseleksi oleh DPR.

Pimpinan Komisi IV dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa telah melakukan upaya mencari titik temu. Permasalahan krusial terletak pada badan independen yang akan dibentuk yaitu tentang siapa yang akan memimpin badan. Komisi IV berpendapat, ketua badan adalah secara eks-offisio bukan Menteri, dan penetapan personel badan P2H melalui *fit and proper test* oleh DPR atas usul Presiden. Sedangkan Pemerintah mengusulkan Ketua Badan P2H adalah Menteri secara eks-offisio.

Setelah melakukan pembahasan dan mendengarkan posisi Pemerintah mengenai masalah kelembagaan ini, akhirnya diputuskan: [1] pembahasan RUU tentang P3L masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut sampai dengan 28 Juni 2012. Namun, apabila batas waktu yang telah ditentukan belum disepakati, maka akan dilakukan pertemuan konsultasi kembali. [2] Apabila di akhir Masa Persidangan IV belum ada kata sepakat, diusulkan agar dijadikan bahan konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden RI.

[Kedua] RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Panja atas RUU ini secara runtut telah membahas 406 DIM pasal per pasal. Dari pembahasan tersebut ada beberapa hal yang masih sangat krusial yang berkenaan dengan [1] jenis tindak

pidana yang bisa didiversi dan yang tidak bisa didiversi, [2] syarat, tata-cara dan jangka waktu penangkapan, [3] syarat, tata-cara dan jangka waktu penahanan, [4] pengaturan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap petugas dan aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Beberapa materi yang dipending tersebut akan dilanjutkan pembahasannya oleh Panja dan yang sudah selesai, akan dilanjutkan dengan Tim Perumus yang dibentuk oleh Panja. Menjelang pertengahan bulan Juni 2012, Tim Perumus melakukan konsinyering untuk menuntaskan pembahasan yang dilimpahkan oleh Panja kepada Tim Perumus.

PELAKSANAAN BIDANG ANGGARAN

Sesuai dengan siklus pembahasan, Komisi-Komisi dialokasikan waktu untuk melakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 dan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka Penyusunan RAPBN TA. 2013.

Komisi VII dan Komisi XI DPR RI dengan pasangan kerjanya melakukan pembahasan asumsi dasar dalam RAPBN 2013 dari tanggal 30 Mei s.d 1 Juni 2012. Sedangkan RKA KL dan RKP KL Tahun 2013, dibahas Komisi I s.d Komisi XI dengan pasangan kerjanya dari tanggal 30 Mei s.d 8 Juni 2012.

Adapun hasil pembahasan di Komisi-Komisi tersebut disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk penyelesaian akhir Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2013.

Sementara itu untuk mendapatkan masukan dalam rangka pembahasan RKP Tahun 2013 dan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka Penyusunan RAPBN TA. 2013, Badan Anggaran tanggal 6 Juni 2012 melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. DR. Hidayat Syarif dan DR. Eni Sri Hartati mengenai Evaluasi Pencapaian Target RKP dan RPJM dalam Pembiayaan Tahunan APBN. Hari berikutnya tanggal 7 Juni 2012, Badan Anggaran melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten

Seluruh Indonesia (APKASI) mengenai Transfer ke Daerah dan Upaya Mempercepat Pembangunan Daerah.

PELAKSANAAN BIDANG PENGAWASAN

Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Luar Negeri pada akhir Mei 2012, menyimpulkan antara lain, Komisi I mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kinerja perlindungan WNI di luar negeri, terlebih lagi anak dibawah umur yang terlibat masalah hukum di luar negeri. Dengan melihat kondisi perkembangan kawasan regional terkini, termasuk proses penyelesaian konflik batas wilayah, Konflik di Filipina Selatan, perkembangan dinamika di Laut China Selatan dan proses demokratisasi di Myanmar, Komisi I meminta Pemerintah untuk tetap berperan aktif dalam upaya menciptakan stabilitas kawasan dalam kerangka upaya peningkatan kesejahteraan dan demokratisasi di kawasan.

Komisi I mendorong pemerintah melakukan pendekatan lintas sektoral, dalam upaya peningkatan penerapan HAM di Indonesia sebagai negara demokrasi sesuai dengan standar universal.

Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Informatika mengagendakan pembahasan terkait kasus pencurian pulsa, program digitalisasi penyiaran, dan penyampaian RKP Kemenkominfo tahun 2013. Kesimpulan rapat adalah: dalam rangka penguatan legalitas keberadaan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Komisi I bersama Pemerintah sepakat untuk melakukan pembenaan dari sisi regulasi dengan melakukan penyempurnaan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai usulan dari Pemerintah pada Prolegnas 2013. Agar tidak terjadi kekosongan hukum terkait dengan jasa konten telekomuni-

kasi, Komisi I mendukung Kemenkominfo untuk menyempurnakan Permen No 1 tahun 2009 sebagai payung hukum sampai dikeluarkannya revisi UU No. 36 tahun 1999. Komisi I mendukung kebijakan Kemenkominfo untuk melaksanakan program digitalisasi penyiaran sesuai *roadmap* yang telah ditetapkan, untuk itu, Pemerintah perlu melakukan komunikasi intensif dengan Komisi I sehingga proses migrasi dari analog ke digital berjalan dengan baik dengan mengutamakan kepentingan publik serta menjamin prinsip *diversity of content dan diversity of ownership*.

Komisi V melakukan Raker dengan Menteri Perumahan Rakyat dengan agenda pembahasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan rumah swadaya, rusunawa, rumah khusus dan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kawasan. Kesimpulannya, Komisi V meminta Kementerian Perumahan Rakyat agar menetapkan dan melaksanakan standar serah-terima pembangunan rusunawa, sehingga mutu dan kualitasnya sama. Mendesak Kementerian untuk mengoptimalkan penghunian rusunawa yang telah terbangun dengan mengkoordinasikan penyelesaian permasalahannya antara lain aksesibilitas, air bersih, jaringan listrik, furnitur dan serah-terima aset.

Komisi V sepakat dengan Pemerintah untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan pengalokasian program kegiatan antara lain perumahan swadaya. Mendesak pemerintah untuk percepatan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2012 agar penyerapan anggaran dapat terlaksana optimal sampai akhir tahun dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya program rusunawa dan perumahan swadaya.



Priyo Minta Australia Perlakukan 400 WNI Secara Manusiawi

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengapresiasi positif pernyataan Wakil Dubes Australia yang menilai persoalan pemberian grasi Corby merupakan persoalan internal domestik pemerintah Indonesia.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima Wakil Dubes Australia Davide Engel

“Kita menghargai pernyataan Australia bahwa Persoalan Corby ini persoalan internal domestik tetapi intinya ini merupakan kasus narkoba bukan Corby sebagai warga negara Australia,”kata Priyo saat menerima Wakil Dubes Australia Davide Engel, Jum’at,(1/6).

Menurut Priyo, dirinya telah meminta pemerintah Australia agar memperlakukan secara manusiawi 400 Warga Negara Indonesia yang ditangkap di perairan Australia tersebut.

Dia menambahkan, dari 400 warga yang ditangkap tersebut terdapat 27 anak-anak, karena itu kita menitipkan melalui Wakil Dubes Australia agar memperlakukan anak-anak tersebut secara manusiawi. “Karena jika masyarakat tahu diperlakukan tidak manusiawi banyak warga Indonesia yang akan marah nantinya,”katanya.

Pada kesempatan itu, Wakil Dubes Australia di Indonesia Davide Engel melaporkan kepada Wakil Ketua DPR

Priyo Budi Santoso bahwa persoalan pembebasan sejumlah warga Indonesia tidak ada deal apapun dengan Pemerintah Indonesia ataupun kaitannya dengan pemberian grasi Corby ini. “Ini tidak ada deal apapun,”katanya saat menemui Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR.

Menurut Davide, sejak November hingga sekarang ini, pemerintah Australia telah memulangkan 49 anak-anak asal Indonesia. “kita ingin mempersingkat pemulangan anak-anak tersebut ke Indonesia,”katanya kepada Pimpinan Dewan di ruang kerjanya.

Menurut catatan, lanjut Davide, saat ini 27 anak Indonesia telah diproses di Australia dan akan dipercepat proses pemulangannya. “Bahkan dari 27 anak-anak tersebut sedang berjalan pemrosesan 9 anak,”paparnya. Bahkan, tambahnya, Kejaksaan Australia juga sedang mereview 24 kasus mereka agar mereka dapat segera kembali ke Indonesia.

Dia menambahkan, pemerintah Australia tidak pernah mengirim anak-anak tersebut ke Penjara. “Jika pengadilan mendapati mereka anak-anak, maka pengadilan tidak akan memenjaranya tapi memulangkannya. Tidak ada satupun nelayan anak-anak Indonesia ditahan,”ujarnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pemberian grasi Presiden SBY terhadap Corby memang ditanggapi pro kontra oleh masyarakat. Namun, disini kita menegaskan Kedua negara terus berkomitmen meningkatkan hubungan kedua negara.

“Saya bahkan menganjurkan rekan-rekan di DPR untuk tidak tergesa-gesa mengajukan interpelasi. Lebih baik panggil Menlu dan Menhuk HAM jika perlu adakan Raker gabungan bersama Komisi III dan Komisi I DPR untuk mengklarifikasinya daripada harus interpelasi persoalan ini,”ujarnya kepada Wakil Dubes Australia.(si)/foto: iwan armanias/parle.

Komisi I Pertanyakan Persoalan Status Tanah Lemhannas

Komisi I DPR RI mempertanyakan mengenai status tanah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), menindaklanjuti informasi yang didapatkan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya tanyakan mengenai status tanah Lemhannas, Informasi dari BPN, ada persoalan terkait tanah Lemhannas,” ungkap Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq saat RDP Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua TB.Hasanuddin, yang mengagendakan RKP dan RKA-KL 2013 Lemhannas, Wantannas, dan Lemsaneg, di Gedung DPR, Senin (4/6).

Menurut Mahfudz Siddiq, mungkin perlu disampaikan penyelesaian di tingkat Sekretariat Negara (Sekneg) seperti apa, karena kalau secara bukti hukum kuat di pihak ketiga ini harus dicarikan solusinya pihak lemhanas, yang akan dimasukkan dalam rencana kerja lemhanas 2013.

Menanggapi hal tersebut, TB. Hasanuddin menegaskan penyelesaian masalah status tanah ini harus melihat solusinya perlu dana atau tidak, dan

itu jika ada hak orang lain. “Kalau bisa dengan hukum bisa lebih baik agar tidak terkatung,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Gubernur Lemhannas Budi Soesilo Supandji membenarkan masih adanya persoalan status tanah. “Kami mendapat aduan dari pihak ketiga untuk masalah tanah,” katanya.

Dia menjelaskan, tanah Lemhannas terletak di Merdeka Selatan No.10 dan Jalan kebon sirih, yang selanjutnya menyatu, jadi ada dua persil yang berbeda. Yang dikebon sirih sudah tidak ada masalah karena setiap melakukan IMB yang ditanyakan pertama adalah sertifikat tidak masalah. Namun yang masih mempunyai persoalan adalah di Jalan Merdeka Selatan No.10.

Terkait Jalan Merdeka Selatan No.10, lanjutnya, Lemhannas pernah mendapatkan aduan dari pihak ketiga

untuk masalah tanah itu, namun karena sebagai pengguna, maka masalah tersebut disampaikan untuk diselesaikan di tingkat Sekneg, “Karena kami adalah pengguna, jadi saya harus dilihat dipetanya titik mana yang ada masalah, jadi ada bagian yang secara administrative belum memiliki sertifikat,” katanya.

Bahas RKP dan RKA-KL 2013 Lemhannas, Wantannas, dan Lemsaneg

Komisi I DPR RI mendapatkan penjelasan terkait RKP dan RKA-KL 2013, Pagu indikatif pada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Rp.243 Miliar, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Rp. 243 Miliar, dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Rp. 1.1 Triliun. “Komisi I akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk kemudian menyampaikannya kepada Badan Anggaran DPR RI,” Kata Wakil Ketua Komisi I TB.Hasanuddin.

TB.Hasanuddin mengungkapkan, komisi I menyetujui mengubah revisi anggaran Lemhannas Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 933 juta, untuk segera mengalokasikan kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lemhannas.

Lebih lanjut, Komisi I memberikan apresiasi kepada tiga Lembaga Negara non Kementerian tersebut, atas *reward* yang diberikan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan anggaran belanja Tahun Anggaran 2011. “Terkait hal tersebut Komisi I DPR RI menyetujui penyesuaian RKA-KL Tahun 2012 untuk Lemhannas Rp. 321 Juta, Wantannas Rp.137 juta, dan Lemsaneg Rp. 4.2 Miliar,” paparnya. Selain itu, Komisi I juga memberikan dukungan kepada Lemhannas, Wantannas, dan Lemsaneg terkait rencana pemberian tujangan kinerja atau remunerasi. (as). foto:iwan armanias/parle.



Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq (kiri)

Sejumlah Anggota Baleg Minta Dalami Dulu Perubahan UU 42 Tahun 2008

Sejumlah Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta Pimpinan Baleg untuk mendalami terlebih dulu perlu tidaknya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

UU tersebut memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2012 untuk dilakukan perubahan. Namun, tidak karena semata-mata masuk dalam Prolegnas UU tersebut harus dilakukan perubahan.

Anggota Baleg Abdul Hakim dan Ali Wongso menyampaikan hal itu dalam rapat Baleg mendengarkan presentasi Deputy Bidang Perundang-Undangan Sekjen DPR RI, Senin (4/6) yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Anna Mu'awanah.

Ali Wongso mengatakan, dia berpandangan sama dengan Abdul Hakim, sejauh ini belum menemukan masalah yang substansial dalam UU tersebut yang perlu dilakukan perubahan.

Dia juga menilai naskah akademis yang disampaikan Tim Perundang-Undangan tersebut belum menjelaskan tujuan dan kegunaan dibuatnya naskah akademis. Sebenarnya, setelah diuraikan berbagai masalah yang ditemukan, baru kesimpulannya mengatakan perlu tidaknya dilakukan amandemen.

Menurut Ali Wongso, sebuah UU perlu dilakukan amandemen jika memang ada urgensinya untuk dirubah. Baik karena ada persoalan dalam kaitannya dengan penguatan sistem, maupun masalah-masalah yang tidak bisa diakomodir di dalam PP nya atau peraturan dibawahnya sehingga harus dilakukan perubahan.

Dia juga menambahkan, tujuan dan kegunaan dibuatnya Naskah Akademis (NA) ini sebenarnya untuk mencari atau merumuskan penguatan sistem artinya memecahkan masalah-masalah sehingga sistem itu sudah bisa mengantisipasi, merespon, mencegah



Anggota Baleg DPR RI Ali Wongso (kanan) dan Arif Wibowo (kiri)

terjadinya masalah-masalah yang serupa.

Arahnya, katanya, tentu dalam rangka kebutuhan penguatan kepemimpinan bangsa ke depan dalam kerangka konstitusi sistem presidensial dan dalam era multi partai sekarang ini selain tetap menjaga atau mengembangkan demokratisasi.

“Jadi jelas arahnya, jangan sampai kita membuat suatu perubahan arahnya tidak jelas, perubahan itu harus menguatkan sistem, kalau sistem itu dilaksanakan memberi penguatan terhadap kepemimpinan bangsa karena RUU ini akan melahirkan presiden dan wakil presiden. Apapun inputnya sistem itu akan mengeluarkan presiden yang kuat, kepemimpinan yang kuat dan efektif bagi kepentingan nasional ke depan dan demokratis,” katanya.

Di sini perlu dicari terlebih dahulu akar-akar permasalahan. Dalam hal ini Baleg perlu menyamakan ba-

hasa, samakan pandangan, baru dapat melangkah lebih jauh. “Jadi jangan karena masuk di Prolegnas harus kiranya ubah, sebaiknya jangan begitu kita harus dalami dulu,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Perundang-Undangan menyampaikan Naskah Akademis beberapa Pokok-pokok perubahan UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Beberapa hal yang disoroti Tim Perundang-Undangan diantaranya adalah struktur pengawas Pemilu Pilpres, penguatan peran Bawaslu, Dewan Kehormatan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, metode pemberian suara.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kampanye Pemilu, persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan ketentuan pidana. (tt) foto:wy/parle

BPWS Diminta Buat Program Menyeluruh Terhadap Pembangunan Madura

Komisi V DPR RI minta Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) membuat program yang menyeluruh terhadap pembangunan Pulau Madura khususnya.



Anggota Komisi V DPR RI Rendhy Lamajido

Selama ini, masyarakat sering beranggapan pembangunan wilayah Madura hanya sekitar jembatan Suramadu saja. Padahal masyarakat menginginkan pembangunan Madura bukan hanya di Bangkalan, tapi juga di kabupaten-kabupaten lain di Pulau Madura.

Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR Rendhy Lamajido saat rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, Kepala BPWS dan Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Selasa sore (5/6) yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow.

Dalam hal ini Rendhy melihat ada kegagalan daripada membangun opini masyarakat. Seharusnya BPWS gencar melakukan sosialisasi, sehingga masyarakat tahu konsep pembangunan Suramadu.

Rendhy menilai, konsep yang dibangun oleh badan ini mungkin tidak terlalu komprehensif dengan beberapa Bupati se Madura atau tidak kooperatif dalam melakukan sosialisasi di masyarakat, sehingga Rendhy mengang-

gap ini suatu kegagalan.

Tentunya, kata Rendhy, kegagalan ini jangan sampai terulang kembali dan perlu perbaikan di tahun mendatang, agar opini dari badan ini benar-benar tidak terjebak pada hanya membangun salah satu kabupaten saja.

“Karena kalau opini ini sudah melekat di masyarakat agak sulit merubah opini itu. Makanya perlu sosialisasi, dengan adanya badan ini dibuat suatu ramuan yang akan mengembangkan seluruh Madura bukan saja per kabupaten,” katanya.

Masih menyoroti BPWS, anggota dari F-PDI Perjuangan Sadarestuwati menambahkan, dia prihatin dengan kondisi BPWS. Estu bahkan menilai kinerja BPWS ini stagnan, ada permasalahan pembebasan lahan yang belum juga terselesaikan yang berakibat pembangunan Suramadu tidak dapat berjalan dengan baik.

Estu mengkhawatirkan, jika pembebasan lahan tidak segera terselesaikan sementara pedagang kaki lima menjamur luar biasa, apakah ini tidak menjadi satu permasalahan baru yang

nantinya akan menguras energi dari pemerintah.

Karena Estu melihat, persoalan yang muncul terkait dengan pembebasan lahan di BPWS ini karena ada campur tangan pihak lain yang sudah memberikan uang “panjar” kepada pemilik-pemilik walaupun nilainya sangat rendah, yang kemudian pihak lain ini mengajukan harga yang tidak masuk akal.

Disinilah sulitnya pembebasan lahan itu, padahal masyarakat Madura menginginkan Madura segera dibangun, tetapi kondisi lahan tidak bisa dibeli, tidak bisa diselesaikan proses jual belinya oleh pemerintah dengan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPWS Mohamad Irian menyampaikan, pembebasan lahan belum dapat terlaksana karena belum adanya kesepakatan mengenai harga tanah dengan pemilik tanah.

Dalam hal pembangunan wilayah Suramadu ini, memang ada tuntutan dari masyarakat, BPWS jangan membangun di Madura, tetapi membangun Madura seutuhnya. Para Bupati pun menuntut, BPWS jangan hanya membangun di Bangkalan, tetapi diharapkan adanya pemerataan pembangunan di Kabupaten lain di Madura.

Kebijakan dan strategi pelaksanaan BPWS di tahun 2013, mempercepat pengadaan lahan melalui pendekatan tugas perbantuan kepada daerah dan mempercepat pengadaan lahan dan Detail Engineering Design (DED) di kawasan kaki jembatan sisi Surabaya.

Selain itu, strategi lain yang dijalankan BPWS adalah menyusun pola investasi dan kerjasama dengan swasta serta sistem perijinan untuk mendukung Promosi Pengembangan Kawasan. (tt) foto:parle

Komisi VI DPR Setujui Pagu Indikatif BP Batam dan BP Sabang

Komisi VI DPR menyetujui usulan Pagu Indikatif BP Batam Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 934,9 miliar dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 yang terdiri dari Rupiah Murni, Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Demikian salah satu kesimpulan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima (F-PDI Perjuangan) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, di Gedung Nusantara I, Selasa (5/6).

Komisi VI DPR juga menyetujui usulan Pagu Indikatif BP Sabang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 392,2 miliar, kata Bima.

“Kedua usulan pagu indikatif tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat Kelompok Kerja (Pokja) BUMN Komisi VI DPR RI,” tambahnya. (iw)/foto/iwan armanias/parle.



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (F-PDI Perjuangan)

DPR Sesalkan Mandegnya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Pemerintah

Komisi IV DPR RI sesalkan pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menjadi usul inisiatif DPR RI mandeg di Pemerintah. Seharusnya RUU ini pada masa sidang yang lalu ditargetkan masuk dalam tahap pembahasan tingkat II.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo disela-sela kunjungannya ke Semarang-baru-baru ini dalam rangka penandatanganan kerjasama pembangunan sektor pertanian berbasis teknologi dengan konsep pengembangan manajemen hulu hilir.

Firman mengatakan, keberadaan RUU ini sangat urgent dan sangat ideal, karena RUU ini memberikan proteksi dan perlindungan baik petani itu sendiri maupun sistemnya. Masalah pangan menjadi hal yang fundamental

dan pangan harus menjadi tanggung jawab negara.

Komisi IV DPR melihat urgensi daripada UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini sangat dibutuhkan. Karena petani kita sekarang ini dalam posisi yang sangat sulit. Sebagai contoh, di Korea petani sudah mendapatkan proteksi dan perlindungan yang luar biasa, baik komoditinya maupun juga manusianya.

Sementara di Indonesia belum ada aturan yang mengatur tentang hal itu, padahal di Indonesia sangat rentan

dengan bencana, baik bencana alam seperti meletusnya gunung merapi, atau bencana lain seperti musibah karena serangan poso, serangan hama dan sebagainya.

Dalam RUU ini salah satu pasalnya mengadopsi bahwa konsep pengembangan pertanian berbasis teknologi dengan manajemen hulu hilir dan salah satunya adalah petani itu dibuatkan asuransi.

Menurut Firman, sistem ini sudah berjalan di negara-negara lain seperti Korea, Cina, Jepang dan di Amerika



Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo

juga sudah mulai jalan.

Oleh karena itu, katanya, gagasan pemikiran kita sudah sangat maju dan ketika petani nanti dihadapkan pada persoalan-persoalan, petani tidak akan kebingungan seperti sekarang ini.

Inilah yang diharapkan dari RUU ini, disamping aspek untuk memberikan cover asuransi juga mengenai aspek pembiayaan. Di negara-negara maju seperti Korea dan Cina, ada yang disebut Bank Pertanian. Tapi di Indonesia, Bank Pertanian itu tidak pada tatanan ideal, karena untuk petani menengah ke bawah, paling sulit mendapatkan akses kemudahan dari Perbankan.

Untuk itu, di dalam RUU ini juga memasukkan dalam salah satu pasal dibentuknya lembaga keuangan mikro yang akan memberikan aspek pelayanan modal kepada petani dengan persyaratan yang mudah dan lembaga keuangan mikro itu ada di tingkat kecamatan-kecamatan, sehingga petani akan mudah mendapatkan pelayanan permodalan.

Namun sayangnya, kata Firman, sampai hari ini draft RUU yang telah disampaikan DPR kepada Pemerintah belum mendapatkan respons. Karena pemerintah keberatan terhadap dua pasal itu.

Padahal, kalau dua pasal itu ditunda oleh pemerintah justru esensi dari pada pentingnya RUU tersebut rohnyanya ada di dua pasal itu. Kalau dua pasal

itu tidak disetujui pemerintah artinya pemerintah tidak peduli kepentingan rakyat kecil, dan tidak berpihak pada kepentingan petani.

Firman menjelaskan, kebutuhan pangan nasional kita mencapai 35 juta ton per tahun dan indikasi laju permintaan pangan itu akan mengalami peningkatan sampai 4,87 persen per tahun. Ini akibat dari laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen dan juga akibat dari pada konsekuensi peningkatan pendapatan masyarakat yang naik serta akibat konvensi pangan masyarakat Indonesia yang biasanya mengkonsumsi makanan pokok non beras beralih ke beras.

“Ini yang harus diantisipasi, kalau tidak diantisipasi dan tidak dibuat regulasi dan perlindungannya saya khawatir Indonesia memang didisain oleh kelompok tertentu supaya Indonesia sebagai negara yang berpenduduk besar ini akan menjadi importir besar di dunia,” kata Firman.

Sangat disayangkan, sebagai negara agraris yang berpenduduk besar, kebutuhan nasional belum dapat tercukupi oleh produk-produk dari petani lokal.

Lemahnya petani kita karena tidak didukung oleh sistem, selain itu petani kita juga masih konvensional dan tidak didukung oleh aspek teknologi, manajemen dan pendanaan. Oleh karena itu, RUU ini sangat diperlukan karena kita belum mempunyai suatu

aturan hukum yang melindungi, memproteksi petani. Disinilah muncul gagasan perlunya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

UU ini nantinya betul-betul diharapkan bisa memproteksi, melindungi keberadaan petani dan bisa memberikan supporting kepada petani ke depan bagaimana petani itu dapat mencapai cita-citanya sebagai petani yang sejahtera.

Selama ini Firman melihat, petani kita dilepas begitu saja tidak mendapatkan perhatian yang cukup baik dari pemerintah karena tidak ada regulasi yang mendukung keberadaan mereka.

Salah satu contoh mengenai ketersediaan lahan pertanian, kita memiliki UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, namun faktanya sampai hari ini lahan pertanian kita yang luasnya 2,3 juta hektar irigasi teknis, sampai hari ini yang terairi oleh air yang masih berfungsi hanya 11 persen.

Sementara, kebutuhan pangan nasional yang mencapai 35 juta ton per tahun, 55 persen dari kebutuhan pangan nasional kita masih ditopang suplai dari Pulau Jawa.

Hal ini yang menjadi keprihatinan bersama, dimana setiap tahun terjadi alih fungsi lahan pertanian rata-rata hampir mencapai 100 ribu hektar, sedangkan pertumbuhan pencetakan sawah baru oleh pemerintah setiap tahun hanya mencapai 40 ribu hektar.

Ini berarti, kalau kita mau swasembada pangan sulit terkejar karena laju daripada konvensi lahan pertanian dibandingkan dengan pencetakan sawah yang dilakukan pemerintah jauh ketinggalan, selisihnya sekitar 60 ribu hektar.

“Kalau ini didiamkan kemungkinan ke depan anak cucu kita untuk mendapatkan kebijakan pangan yang notabene produk dalam negeri akan sulit,” tambahnya.

Selain itu, yang menjadi keprihatinan kita terjadinya tingkat penurunan petani. Data yang diterima Komisi IV DPR, petani kita sekarang ini jumlahnya sekitar 41-43 persen, di tahun 2011 terjadi penurunan kurang lebih sekitar 2,16 juta atau sekitar 5,2 persen. (tt)/ foto: iwan armanias/parle.

Komisi IX DPR Menyetujui Pagu Indikatif Kemenkes Sebesar Rp. 30 Triliun

Komisi IX DPR dapat menerima Pagu Indikatif kementerian Kesehatan tahun 2013 sebesar Rp.30 Triliun untuk selanjutnya dibahas secara detail per Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat berikutnya, dengan catatan untuk memperhatikan masukan-masukan anggota Komisi IX DPR.

Hal itu dikatakan Ketua Rapat Ribka Tjiptaning pada saat Rapat Dengar pendapat dengan Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron, rapat dilakukan di ruang rapat komisi IX DPR Gedung Nusantara I Senayan Jakarta, Senin (4/6) siang.

Ketua Komisi IX DPR yang sekaligus memimpin rapat juga meminta, Kementerian kesehatan untuk melakukan penyesuaian program di dalam rencana kerja Pemerintah tahun 2013, sesuai persetujuan alokasi anggaran sehingga tepat sasaran dan efektif, sekaligus menyongsong pelaksanaan BPJS Kesehatan tahun 2014.

Ribka Tjiptaning juga menambahkan, bahwa Komisi IX DPR juga menyetujui APBN-P Kementerian kesehatan tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 2.4 Triliun dan akan memperjuangkan

penambahan alokasi APBN-P dalam rapat Badan Anggaran DPR.

Dia juga mengemukakan, guna mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat agar tercipta pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dalam rangka menyongsong pelaksanaan BPJS Kesehatan tahun 2014, maka Komisi IX DPR meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk menyeimbangkan upaya renovasi dan pemenuhan kebutuhan tempat tidur dengan pengadaan fasilitas kesehatan dasar di daerah.

Disamping itu, Komisi IX DPR juga meminta agar segera revitalisasi Puskesmas, melakukan realokasi anggaran untuk pendistribusian secara merata dan peningkatan profesionalisme SDM Kesehatan, serta membuat kebijakan dan proposal disertai rekomendasi

dasi pemerintahan daerah untuk membantu daerah menerapkan e-planning dengan tepat dan efisien.

Ketua Rapat Ribka Tjiptaning juga mengatakan bahwa Komisi IX DPR meminta kepada kementerian kesehatan RI untuk memperluas program yang bersifat promotif dan preventif, serta mendesak Kementerian kesehatan untuk memberikan perhatian khusus dan pembinaan kepada profesi Tukang Gigi dan Varifikator Independen Jamkesmas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dikatakan juga bahwa, Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan memberikan data tahun 2008-2012 tentang kuota penerima Jamkesmas dan Jampersal serta penyerapan anggaran program tersebut paling lambat 18 Juni 2012. (Spy) foto:parle



Ribka Tjiptaning (kanan) saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron

BNP2TKI Diminta Fasilitas TKI

BNP2TKI diminta memfasilitasi para TKI yang ingin mudik di kampung halamannya. Karena pasalnya, seringkali ditemui Para TKI kebingungan ketika sampai Bandara Soekarno Hatta dan seringkali ditipu oleh para oknum jasa transportasi bandara.



Tenaga Kerja Indonesia saat berada di ruang tunggu TKI Bandara Soekarno Hatta



Anggota Komisi IX DPR RI Sri Rahayu (F-PDI Perjuangan)

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi IX DPR Sri Rahayu (F-PDIP) saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNP2TKI Moh. Jumhur Hidayat, di Jakarta, Selasa, (5/6).

“Sesampai di Bandara Sukarno Hatta dan ingin pulang pulang ke kampungnya sendiri saja merasa kebingungan karena disana tidak ada petugas dari BNP2TKI maupun dari Binapenta yang mestinya bertanggungjawab,”kata Sri.

Menurutnya, problem yang besar bagi para TKI yang telah dikirim ke-

luar negeri karena rendahnya tingkat pendidikan para TKI tersebut. “Karena jika TKI yang dikirim oleh BNP2TKI adalah orang-orang yang terdidik itu tidak menjadi masalah, namun apabila para TKI yang dikirim adalah orang-orang yang tidak terdidik ya seperti ini kejadiannya,”ujarnya.

Sementara Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat mengakui masih rendahnya kualitas dan kompetensi Tenaga kerja Indonesia, hal ini merupakan masalah-masalah yang perlu ditangani

seperti masalah kualitas pelayanan dan penempatan serta perlindungan TKI diluar negeri maupun didalam negeri perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Dia mengemukakan, pada prinsipnya pemerintah memfasilitasi para calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri melalui prosedur resmi, dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku, sehingga para calon TKI yang bekerja keluar negeri diharapkan tidak bermasalah, walaupun bermasalah, maka penyelesaiannya akan lebih mudah.

Berbagai kasus/masalah yang terjadi bagi TKI yang bekerja ke luar negeri, baik legal, ilegal non prosedural, lanjutnya, dikarenakan ketidak pahaman atau ketidaksabaran para TKI dalam mengurus dokumen ataupun job. “Dengan berbagai kasus tersebut, diharapkan pemerintah segera melakukan gerakan spektakuler melalui sosialisasi langsung ke kantong-kantong TKI maupun melalui berbagai media,”ujarnya

Jumhur juga mengatakan, masalah perlindungan TKI hingga saat masih menghadapi berbagai kendala, sehingga sedikit demi sedikit masalah tersebut harus segera diselesaikan. (Spy) foto:ry/parle

Mentan Diminta Lakukan Pengawasan Ketat Peternak Lokal

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap peternak-peternak lokal yang kurang memperhatikan perkembangan populasi hewan ternak dengan melakukan pelanggaran penyembelihan sapi betina produktif.

Sebab jika permasalahan-permasalahan di atas tidak segera diantisipasi Pemerintah, maka program swasembada daging akan terganggu dan tidak sesuai dengan target yang telah dicanangkan pemerintah serta dapat mengganggu swasembada daging nasional.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP H. Wan Abu Bakar dalam rapat kerja dengan Menteri pertanian dan jajarannya, Senin (4/6) yang dipimpin Ketua Komisi IV M. Romahurmuziy.

Pemerintah telah mencanangkan Program Swasembada Pangan untuk surplus beras 10 juta ton dan swasembada daging pada tahun 2014. Namun hal ini sulit terwujud jika Pemerintah tidak segera mengatasi berbagai permasalahan dan kendala.

Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah diantaranya adalah masalah lahan pertanian yang sampai saat ini masih banyak yang belum terealisasi dan permasalahan sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi, pupuk dan benih masih banyak yang belum terealisasi sehingga sulit untuk menaikkan tingkat produksi beras lokal.

Sementara untuk swasembada daging juga masih banyak kendala terutama dalam menekan laju import daging baik yang legal maupun illegal.

“Harus ada proteksi yang ketat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur lalu lintas peredaran daging impor ini sehingga tidak mengganggu industri daging maupun peternak di Indonesia,” katanya.

Wan Abu Bakar juga menyoroti pagu indikatif tahun 2013 di kementerian ini untuk subsidi pupuk dan benih yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2013 subsidi pupuk, benih dan cadangan benih nasional

akan mencapai Rp 16, 43 triliun. Kenaikan ini tentunya memberikan harapan besar bagi perbaikan nasib petani Indonesia.

Karena pada tahun-tahun sebelumnya bahkan sampai hari ini, penyaluran dan pengawasan subsidi pupuk dan benih selalu terjadi dan sering merugikan para petani. Dalam distribusi penyaluran pupuk dan benih sering tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran dan sering kualitasnya tidak bagus lagi. Belum lagi dari segi pengawasan yang tidak ketat, sehingga sering terjadi penyelewengan.

Seharusnya, pendistribusian pupuk dan benih ini harus tepat waktu dan tepat sasaran agar petani dapat mempergunakan pada saat musim tanam berlangsung. “Jangan sampai distribusi ini terlambat sehingga mengakibatkan harga pupuk dan benih menjadi mahal. Pemerintah juga harus dapat menjamin transportasi baik darat maupun laut serta infrastruktur seperti jalan, sehingga proses distri-

busi berjalan lancar,” kata Wan.

Wan Abu Bakar mengusulkan apakah tidak sebaiknya pemerintah mengkaji kembali pendistribusian pupuk dan benih yang telah berjalan selama ini. Sebab menurutnya, pendistribusian yang berlaku sekarang tidak efektif. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian perlu merubah sistem pendistribusian, sehingga penyalurannya efektif dirasakan petani.

Wan juga mengingatkan Pemerintah untuk segera menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. DIM ini sudah sangat dinanti-nanti, agar pembahasan RUU tersebut dapat segera dilanjutkan. Dia berharap kebijakan pendistribusian pupuk ini dapat tertuang dalam pasal RUU tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Suswono menyampaikan tahun 2013 merupakan tahun menjelang akhir target pembangunan pertanian periode 2010-2014.

Pada tatanan makro, sasaran pem-



Suasana rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dan jajarannya

bangunan pertanian yang ingin dicapai tahun 2013 adalah Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian tumbuh 3,77%, tenaga kerja pertanian terserap sebesar 44,9 juta orang, Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) ditargetkan berkisar antara 105-110 dan neraca perdagangan surplus US\$ 44,7%.

Sejalan dengan target makro pembangunan pertanian, sasaran produksi komoditas utama yang ingin dicapai di tahun 2013 adalah padi sebesar 72,06

juta ton, jagung 26,00 juta ton, kedelai 2,25 juta ton, gula 3,21 juta ton dan daging sapi 566 ribu ton.

Untuk menjamin ketersediaan pangan, target tahun 2014 harus mampu mencapai surplus beras 10 juta ton. Hal ini, kata Suswono, dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional dan mengantisipasi resiko terhadap lonjakan harga pangan dunia yang diperkirakan akan terjadi di tahun-tahun mendatang.

Suswono menambahkan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 ditekankan fokus pembangunan setiap Kementerian/Lembaga untuk mendukung rencana aksi Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B), Pengembangan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal serta penanganan dampak bencana alam. (tt) foto:ry/parle

Agun Gunanjar : DKPP Dorong Penegakan Etika Pemilu

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan institusi baru yang segala sesuatunya merujuk kepada UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang bertugas memutus etika penyelenggaraan Pemilu.



Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa saat di wawancarai oleh para wartawan di Gedung Nusantara II DPR RI

“Tugas ini dimungkinkan, apabila terjadi peristiwa-peristiwa pada pemilu yang lalu, dimana banyak sikap dan perilaku jajaran pelaksana pemilu seperti KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, tidak mematuhi dan menjalankan apa yang sudah diputuskan” kata Agun dihadapan wartawan usai Raker dengan Pemerintah, KPU dan Bawaslu yang mengadakan pengumuman nama-nama calon anggota DKP, Jakarta, Senin (4/6)

la menambahkan, dimasa lalu KPU dan Bawaslu layaknya seperti tom and jerry contohnya hasil keputusan KPU tidak dilaksanakan oleh Bawaslu, begitupun sebaliknya hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak dijalankan oleh KPU.

Untuk itu, lanjut Agun, dimasa mendatang semua telah menyepakati Pemilu tahun 2014 sebagai pemilu yang berkualitas yang tidak menimbulkan sejumlah persoalan.

Mengenai keanggotaan DKPP, kata

Agun, sesuai dengan UU No.15 tahun 2011 berkaitan juga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, bahwa 1 (satu) orang anggotanya dari unsur KPU, 1 (satu) orang dari unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat.

“5 (lima) orang tokoh masyarakat adalah 2 (dua) orang nama tersebut di usulkan oleh presiden, dan 3 (tiga) nama itu diusulkan oleh DPR,” jelasnya. (nt)/foto:iwan armanias/parle

“ Kita akan mempertanyakan kepada Kementerian Pekerjaan Umum terkait rekomendasi pembangunan Proyek Hambalang ini, karena pada jaman Menpora Lama Adhyaksa Daud pembangunan proyek tidak boleh bangunan besar karena kondisi tanah itu labil, mengapa sekarang diberikan ijin pembangunan gedung yang lebih besar,” ujarnya di Gedung DPR, Selasa, (5/6).

Menurut Deddy, setelah pembahasan anggaran Kemenpora, Panja Hambalang akan segera bekerja mempertanyakan persoalan Hambalang ini kepada pihak terkait.

Deddy menegaskan, Komisi X DPR tidak pernah dikonsultasikan terkait anggaran proyek Hambalang yang multi years. karena memang yang diusulkan oleh Kementerian itu selalu anggaran tahun tunggal atau single years. “Memang Perpres boleh saja tanpa sepengetahuan DPR akan tetapi bila akumulasi anggaran sebesar Rp. 1.2 Triliun masa DPR tidak tahu karena memang yang memiliki hak dan menetapkan budget itu adalah DPR,” ujarnya.

Menurutnya, kalau kita merujuk UU Keuangan Negara itu merupakan anggaran single years karena kita tidak mungkin membiayai anggaran untuk 2 tahun kedepan yang belum pasti.”Seharusnya memang perlu koordinasi jika terkait anggaran karena memang hak budget itu berada di DPR,” paparnya.

Deddy menambahkan, sejak 6 Februari 2012 lalu Panja Hambalang sudah terbentuk dan sudah bekerja cepat

Panja Hambalang Akan Panggil Menteri PU

Anggota DPR Deddy Gumelar (F-PDIP) mengatakan, Panja Hambalang akan segera memanggil Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto terkait amblasnya proyek Hambalang.



Anggota DPR RI Deddy Gumelar (F-PDI Perjuangan)

memanggil pihak yang terkait proyek Hambalang. “Karena munculnya anggaran multi years ini menimbulkan pertanyaan, langkahnya yaitu kita meminta BPK mengaudit anggaran sebesar Rp. 675 Miliar, setelah muncul hasilnya kita akan segera dalam,” katanya.

Dia mengatakan, pada Februari

atau Maret lalu, DPR sudah mengundang kontraktor dan konsultan perencanaan dan mereka menjawab bahwa proyek tersebut layak secara teknis namun faktanya amblas. “karena itu secara teknis pernyataan itu sudah tidak akurat lagi dan akan kita pertanyakan kembali,” tegasnya. (si)/foto: iwan armanias/parle.



Lokasi amblasnya gedung pada proyek Hambalang

Paripurna DPR Setujui Tiga Nama Anggota DKPP

Rapat Paripurna DPR menyetujui 3 (tiga) nama calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yaitu Jimly Asshidiqie, Saut Hamonangan Sirait dan Nur Hidayat Sardini.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (tengah) dan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa saat berfoto bersama tiga calon anggota DKPP

“Apakah semua setuju, 3 (nama) calon anggota DKPP, untuk disahkan,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat memimpin sidang Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (5/6). “Setuju” Teriak anggota DPR secara bersama-sama, dan palu pun diketok.

Sebelumnya, dalam laporannya, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar

Sudarsa menjelaskan, proses pemilihan calon anggota DKPP didasari pada penilaian yang menyangkut independensi, moralitas, integritas, profesionalitas serta komitmen calon, pengetahuan dan wawasan bidang hukum, penyelenggaraan maupun pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang dimiliki. “Proses pembahasan dilakukan oleh Komisi II dalam suasana yang

sangat dinamis, demokratis, dan penuh kebersamaan,” kata Agun

Dia menambahkan, setelah ini disahkan, Komisi II DPR berharap anggota DKPP terpilih, nantinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu yakni, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

“Sebagai salah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus pengaduan atau laporan dugaan penyelenggaraan kode etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu beserta jajarannya sampai ke tingkat bawah,” jelas Agun dalam laporannya.

Agun mengatakan, DKPP sebagai faktor penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berkualitas untuk memberikan akuntabilitas penuh terhadap pemenang Pemilu, selain unsur KPU dan Bawaslu. (nt)/foto:iwan armanias/parle.

KPK Jangan Hanya Fokus pada Pembangunan Gedung Baru

Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengoptimalkan pembicaraan dengan Menteri Keuangan untuk dapat memanfaatkan gedung pemerintah yang tidak digunakan. Langkah ini dinilai lebih efektif dari pada membangun gedung baru.

“Banyak gedung pemerintah yang dibawah penguasaan Menkeu ternyata tidak bermanfaat maksimal contoh gedung BPPT Thamrin, jadi KPK bisa koordinasi dengan Menkeu. Prinsip kami bagaimana mengefisienkan pengelolaan anggaran jadi tidak

sekedar bangun gedung baru,” kata Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsudin dalam RDP tentang RKA K/L 2013 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/12).

Hal senada disampaikan anggota Komisi III dari FPPP Ahmad Kurdi

Mukri. Usulan anggaran yang disampaikan KPK sebesar Rp.720 miliar dinilai cukup memadai. Ini menurutnya perlu diimbangi dengan prestasi apalagi menurutnya harapan publik pada KPK terlalu besar. “KPK inikan organisasi adhoc jadi sebaiknya fokus pada

prestasi kerja saja, tidak perlu-lah investasi terlalu besar pada gedung,” imbuhnya.

Menjawab hal ini Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengatakan pembicaraan dengan Menkeu sudah dilakukan namun belum menghasilkan putusan konkrit sementara kebutuhan ruang kantor bagi karyawan saat ini sangat mendesak. “Kami bekerja terpencah pada tiga gedung, ini tidak efektif,” jelasnya.

Ia berharap anggaran pembangunan gedung yang tertunda sejak tahun lalu dapat direalisasikan pada tahun 2012 ini. Anggaran senilai Rp.16 miliar akan digunakan untuk proses pembangunan tahap pertama berupa penanaman tiang pancang dan pondasi di tanah negara yang telah tersedia. Dengan pendekatan anggaran multi years diharapkan gedung senilai Rp.225 miliar sudah dapat diselesaikan akhir tahun 2014 nanti. (iky)foto:parle



Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsudin

“Dalam UU no.27/2009 tentang MD3 dijelaskan kewajiban anggota adalah untuk mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan golongan, pribadi. Totalitas itu tidak bisa lagi saya laksanakan jadi saya memilih mundur,” katanya dalam konferensi pers di Ruang Wartawan, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/6/12).

Surat pengunduran diri secara resmi telah disampaikannya kepada Partai Demokrat dan DPR 21 Mei lalu. Ia menyebut budaya mundur mungkin belum lazim dalam perkembangan politik bangsa. Namun Wakil Rakyat dari dapil Jabar II ini meyakini langkah yang dipilihnya sejalan dengan etika politik bersih, cerdas dan santun yang dijunjung tinggi pemimpin dan pendahulu bangsa.

“Saya tidak mau menjadi orang yang hipokrit, tidak pernah masuk tapi tanda tangan absen, saya lebih memilih menjadi diri saya sendiri apa adanya,” lanjutnya.

Tere memaparkan tidak lagi dapat menjalankan tugas secara total sejak awal tahun 2012. Ia menyebut ada beberapa cobaan perjalanan hidup yang dialaminya beberapa waktu terakhir. Secara khusus ia juga meminta maaf

Tere Memilih Mundur dari DPR dan Partai

Anggota Komisi X DPR RI Theresia Pardede atau biasa dipanggil Tere menyatakan mundur total dari dunia politik praktis. Alasan utama politisi Partai Demokrat yang sebelumnya dikenal sebagai artis penyanyi ini adalah ingin lebih konsentrasi pada masalah keluarga.

terutama kepada para seniman karena belum menuntaskan tugas yang diemban, salah satunya revisi RUU Hak Cipta.

Pada bagian lain anggota DPR yang pernah bertugas di BURT ini membantah kemundurannya terkait dengan permasalahan politik yang sedang berlangsung di Komisi X seperti kasus Wisma Atlet. Hambalang atau kasus lain.

“Selanjutnya saya akan lebih memberi perhatian pada kondisi keluarga, kesehatan ayah saya dan menyelesaikan tesis untuk program pasca sarjana. Saya kira akan lebih tepat saya konsentrasi di pendidikan dan mungkin berbagi dengan teman kaum muda tentang pengalaman yang pernah saya rasakan di politik praktis” pungkaskannya. (iky) foto: wy/parle



Anggota Komisi X DPR RI Theresia Pardede

TB.Hasanuddin : TNI Tidak Boleh Terlibat Pembelian Senjata

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pengguna alat peralatan pertahanan diharapkan tidak ikut terlibat dalam pembelian kebutuhan Alat.



Wakil Ketua Komisi I TB. Hasanudin



“TNI tidak boleh terlibat lagi pergi beli sendiri alat persenjataan, TNI sebagai pengguna menyampaikan spek kebutuhan alutsista yang dilaporkan kepada Menteri Pertahanan,” kata Wakil Ketua Komisi I TB. Hasanuddin.

Setelah Rapat Tim Perumus RUU Industri Pertahanan, ia menjelaskan Menteri Pertahanan akan bekerjasama dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dibentuk Presiden untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan. “KKIP memutuskan bersama Menhan apakah menggunakan produk dalam negeri atau membeli dari luar negeri,” tegasnya di Gedung DPR RI, Senin (4/6).

Selanjutnya, TB.Hasanuddin mengatakan pengguna alat peralatan pertahanan harus menggunakan alutsista produk dalam negeri. Namun apabila industri dalam negeri belum mampu memproduksi keburutan yang dimaksud maka diisyaratkan secara selektif dapat membeli dari luar negeri dengan harus melalui alih teknologi, ofset, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam UU Industri Pertahanan.

Terkait perkembangan pembahasan RUU Industri Pertahanan, TB. Hasanuddin menjelaskan bahwa Komisi I dan Pemerintah telah sepakat membagi RUU tersebut menjadi tujuh klaster. “Pembagian klaster tersebut merupakan Draf usul inisiatif DPR RI yang dibandingkan dengan Draf usul Pemerintah, kemudian terbentuk 7

klaster,” jelasnya.

Kemudian klaster-klaster sebut akan dibahas bersama. Kalau sudah ada kesamaan pendapat mengenai klaster tersebut maka harus ada masuk pada kompilasi. “Kompilasi DIM dan Pasal versi DPR RI dan Pemerintah akan dibahas bersama dengan acuan kesimpulan dari diskusi 7 klaster,” katanya.

TB. Hasanuddin berharap tim perumus pada tanggal 22 juni, berharap sudah final, dan dibawa ke panja untuk mendapatkan kesepakatan bersama tingkat panja. “Kalau sudah setuju dibawa ke pleno komisi 1, dan dikirim ke tingkat paripurna DPR RI,” tegasnya.(as)/foto:iwan armanias/parle.

Ketua DPR Terima Aliansi Mahasiswa Peduli TKI

Ketua DPR Marzuki Alie menerima aliansi mahasiswa peduli Tenaga Kerja Indonesia di Gedung Nusantara III Senayan Jakarta, Selasa (5/6) siang.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, masalah Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri itu masalahnya klasik, karena selama ini seringkali para tenaga kerja memalsukan dokumennya agar mereka bisa bekerja ke luar negeri. “yah persoalannya itu-itu saja seperti paspor dipalsukan, usia, dipalsukan alamatpun juga dipalsukan,”ujarnya.

Persoalan lainnya, lanjut Marzuki, TKI bermasalah seringkali dipulangkan ke Indonesia namun seringkali mereka datang dengan cara yang sama. “itu yang kita namakan persoalan klasik dan berulang,”ujarnya.

Marzuki mengatakan, setiap event keluar negeri dirinya selalu berusaha menemui TKI. Mereka mengeluhkan TKI yang legal seringkali merasa terkontaminasi dengan para TKI yang ilegal. “Contohnya, para majikan di Malaysia itu selalu mencari para buruh yang murah yang tidak resmi, alasannya majikan di Malaysia menggajinya juga lebih murah jika dibandingkan menggaji TKI yang legal,”paparnya.



Demo TKI

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, jika para TKI dilegalisir dan dibuat standar penggajian, para majikan di Malaysia pasti tidak akan mau sama yang TKI Legal karena mereka karena mereka ingin menggajinya lebih rendah dibandingkan standar yang ada.

Menurut Marzuki, persoalan TKI ilegal dapat dikategorikan perdagangan

manusia, karena melanggar aturan, dan harusnya aturannya yang jelas dan tegas diterapkan. “Seharusnya pemerintah Malaysia juga memberlakukan sama, dengan aturan dan hukum yang sama. Maka dari itu Indonesia berhenti mengirim TKI keluar negeri sebelum ada perjanjian yang jelas,”paparnya. (Spy)foto:wy/parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima Aliansi Mahasiswa Peduli TKI



Penandatanganan MoU Rekonsiliasi Keraton Surakarta Hadiningrat, Hangabehi - Tedjowulan yang dihadiri oleh Ketua DPR MARzuki Ali, Pimpinan Komisi V, X, dan II DPR RI, serta perwakilan pemerintah, di Gedung Pustakaloka, 4 Juni 2012. foto:IW



Ketua DPR RI Marzuki Ali menerima kunjungan courtesy call Dubes Belarusia, Tamerlan Karayev di Gedung Nusantara III DPR RI, 6 Juni 2012. foto:IW



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memimpin pleno Penetapan Wakil Ketua BURT Mohammad Syahfan B Sampurno menggantikan Refrizal, di ruang Rapat BURT, 6 Juni 2012. Foto:RY



Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan menerima Duta besar Ceko untuk Indonesia Tomas Smetanka, di Gedung Nusantara III DPR RI 6 Juni 2012. foto:IW



Serah terima jabatan Agus Hermanto menggantikan Mahyuddin menjadi Ketua Komisi X DPR RI, disaksikan Wakil Ketua Taufik Kurniawan, di Ruang Rapat Komisi X. 4 Juni 2012. foto:IW



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan Dubes Azerbaijan untuk Indonesia Tamerlan Karayev dalam pertemuan di ruang kerjanya. 5 Juni 2012 foto:WY